



TESIS

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PENGELOLAAN AIR IRIGASI
SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN AGRIBISNIS
(Studi Kasus Interaksi Antara Hukum Negara Dan Hukum Adat Di Jawa Timur)**

***JURIDICAL STUDY ABOUT WATER IRRIGATION MANAGEMENT
FOR INCREASING AGRIBISNIS EFFORT
(Interaction Case Study Between State Laws And Customary Law In East Java)***

Oleh

I S H A K

NIM: 050720101008

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS JEMBER
JEMBER
2008**

TESIS

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PENGELOLAAN AIR IRIGASI
SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN AGRIBISNIS**

(Studi Kasus Interaksi Antara Hukum Negara Dan Hukum Adat Di Jawa Timur)

***JURIDICAL STUDY ABOUT WATER IRRIGATION MANAGEMENT
FOR INCREASING AGRIBISNIS EFFORT***

(Interaction Case Study Between State Laws And Customary Law In East Java)

Oleh

I S H A K

NIM: 050720101008

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI**

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS JEMBER**

JEMBER

2008

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PENGELOLAAN AIR IRIGASI
SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN AGRIBISNIS
(Studi Kasus Interaksi Antara Hukum Negara Dan Hukum Adat Di Jawa Timur)**

TESIS

**Untuk memperoleh Gelar Magister
dalam Program Studi Ilmu Hukum
pada Program Pascasarjana Universitas Jember**

Oleh

**I S H A K
NIM: 050720101008**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS JEMBER
JEMBER**

TANGGAL 14 JANUARI 2008

LEMBAR PENGESAHAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 14 Januari 2007

O l e h

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.

NIP. 131 601 508

Dosen Pembimbing Anggota,

Mardi Handono, S.H., M.H.

NIP : 131 832 299

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana

Universitas Jember,

Ketua Program Studi

Magister Ilmu Hukum,

Prof. Dr. H. Akhmad Khusyairi, M.A.

NIP. 130 261 689

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.

NIP. 131 759 754

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PENGELOLAAN AIR IRIGASI
SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN AGRIBISNIS
(Studi Kasus Interaksi Antara Hukum Negara Dan Hukum Adat Di Jawa Timur)**

**Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal : 14 Januari 2008**

Susunan Tim Penguji

Ketua,

Hj. Liliek Istiqomah, SH., MH.
NIP. 131 276 661

Anggota I,

Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.
NIP. 131 601 508

Anggota II,

Mardi Handono, S.H., M.H.
NIP : 131 832 299

Mengetahui/Menyetujui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.
NIP. 131 759 754

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Ilmu Hukum), baik di Universitas Jember maupun di Perguruan tinggi lainnya.
2. Tesis ini merupakan hasil gagasan, ide, pemikiran, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini maupun sanksi lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Jember.

Jember, 14 Januari 2008

Pembuat pernyataan,

ISHAK
NIM: 050720101008

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. sebagai Dosen Pembimbing Utama (DPU) dan Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Anggota (DPA) yang dengan penuh perhatian telah memberikan bimbingan, semangat dan saran yang bermanfaat dalam mengembangkan tesis ini sesuai dengan isu permasalahan yang menjadikannya tetap konsisten.

Dengan selesainya tesis ini, perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. **Dr. Ir. Tarsicius Sutikto, M.Sc.**, Rektor Universitas Jember atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ilmu Hukum.
2. **Prof. Dr. H. Achmad Kusyairi, M.A.**, Direktur Program Pascasarjana Universitas Jember atas kesempatan untuk menjadi mahasiswa Program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Jember.
3. **Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.**, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum atas kesempatan dan dorongan yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister.
4. **Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.**, Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Pembimbing Tesis yang telah memberikan perhatian, semangat dan dorongan, terutama di awal usulan penelitian tesis sampai dengan ujian tesis.

5. **Ibu Hj. Liliek Istiqomah, SH.,MH.,** selaku Ketua Tim Penguji yang telah banyak memberikan arahan, masukan, untuk melakukan perbaikan tesis hingga selesai.
6. **Istriku tercinta Hj. Aida Alif Istiandri, S.H., dan anakku tersayang Deria Faidzara Safra Haqie, M. Devany Rizal Haqie, M. Gastoni Rizal Haqie** pemberi inspirasi dalam mengerjakan tesis ini, semoga rahmat dan lindungan Allah selalu menyertai.
7. **Ayahanda Prof. Dr. H. Mawi Arifin, S.H. (Alm) dan Ibunda Hj. Nikmah Rokayah dan Kakakku Siti Anisah, S.H. dan dr. M. Iqbal Fathoni** juga kedua keponakanku Naila S. Fandiari dan Soraya C. Zahwa yang selalu memberi dorongan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah;
8. **Keluarga besar Kalisat, Bapak Abdul Hadi dan Ibu Sukowati, juga adikku Yuswan Alfahrizi S.E., Afda Adin Istadia, S.E dan Son Okta Soni Pribadi, S.E.** dan putri semata wayangnya Nasya atas dukungan yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan kuliah;
9. **Rekan Dinas Pengairan Kabupaten Jember,** atas bantuan, dorongan dan saran untuk menempuh Program Studi Ilmu Hukum;
10. **Seluruh keluarga besar Pascasarjana Universitas Jember,** yang telah memberikan partisipasinya dalam seminar Usulan Penelitian Tesis dengan memberikan komentar, kritikan dan saran sehingga dapat membantu penulis menyempurnakan Tesis ini;
11. **Keluarga Besar Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Angkatan ke II Tahun Akademik 2005,** yang kompak dan akrab serta saling memberikan perhatian sehingga dalam menjalani perkuliahan dengan suka dan duka dapat dirasakan bersama.

Penulis bersyukur kepada Allah, SWT, disertai dengan harapan, semoga bersama inayah-Nya karya ilmiah berupa tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, memperkaya khazanah dan ilmu pengetahuan.

Jember, Januari 2008

Penulis

RINGKASAN

Indonesia merupakan negara agraris, dimana mayoritas masyarakatnya memiliki profesi sebagai petani. Oleh karenanya, bagi masyarakat Indonesia air dianggap sebagai bagian penting dari pola kehidupan agraris. Sedemikian pentingnya peran air irigasi bagi kehidupan masyarakat akhirnya timbullah nilai-nilai kearifan lokal yang mengatur mengenai pengelolaan air irigasi. Ketaatan masyarakat terhadap norma-norma sosial tersebut akhirnya menumbuhkan lembaga adat yang mengelola air irigasi.

Pada perkembangannya, lembaga adat semakin kehilangan eksistensi dengan adanya lembaga-lembaga formal yang dibentuk oleh negara. Pada dasarnya secara normatif lembaga formal tersebut dibentuk oleh negara dalam upaya menjaga stabilitas pengelolaan air irigasi. Namun terdapat pula motif politis, bahwa pelembagaan pengelolaan air irigasi dalam hukum negara merupakan suatu prasyarat untuk mendapatkan pinjaman dari luar negeri. Dengan demikian, keberadaan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah tersebut bukan didasarkan akan kebutuhan para petani, melainkan karena adanya kepentingan negara terhadap suntikan dana asing.

Tesis ini mengangkat tiga permasalahan pokok, yaitu : (a) Bagaimanakah pengelolaan air irigasi yang dilakukan oleh lembaga hukum adat dan hukum Negara?; (b) Bagaimanakah pengaturan pengelolaan air untuk irigasi oleh hukum negara di Jawa Timur sebagai upaya untuk meningkatkan agribisnis?; (c) Apakah konflik yang terjadi dalam pengelolaan air irigasi serta solusi atas permasalahan tersebut dalam perundang-undangan ?.

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk menelaah dan menganalisis pengelolaan air irigasi yang dilakukan oleh lembaga hukum adat dan hukum negara. Disamping itu untuk menelaah dan menganalisis fungsi HIPPA dalam pengelolaan dan distribusi air untuk irigasi khususnya di Jawa Timur sebagai upaya untuk meningkatkan agribisnis. Serta menelaah dan menganalisis konflik yang terjadi dalam pengelolaan air irigasi serta solusi atas permasalahan tersebut berdasarkan hukum dan perundang-undangan.

Pengelolaan air irigasi yang dilakukan oleh lembaga hukum adat dilakukan secara turun-temurun. Dengan berpedoman kepada kearifan lokal tersebut merupakan nilai-nilai yang turun temurun telah diikuti oleh beberapa generasi. Konflik yang terjadi

dalam pengelolaan air irigasi timbul sebagai akibat adanya instrumen pemerintah yaitu HIPPA sebagai pengelola baru. Pengaturan pengelolaan air irigasi yang dibuat pemerintah lebih bersifat top down, sehingga tidak melihat aspek sosiologis yang telah hidup di masyarakat dan tidak akomodatif terhadap norma-norma kearifan lokal yang terlebih dahulu ada. Akibatnya terdapat interaksi antara instrumen hukum negara dan hukum adat yang berujung pada konflik pengelolaan air irigasi, konflik tersebut berupa pengelolaan cara pendistribusian air, kompensasi yang diberikan atas pengelolaan air, dan pengangkatan kepala blok yang menggantikan fungsi ulu-ulu.

Pengaturan pengelolaan air untuk irigasi oleh hukum negara di Jawa Timur dilakukan melalui Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No 6 Tahun 2003 tentang Irigasi, yang kemudian ditindak lanjuti oleh Peraturan Daerah pada masing-masing Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Timur. Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) merupakan kelembagaan yang secara formal diakui oleh Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur untuk melakukan pengelolaan pada bidang air irigasi. Kelembagaan formal yang diberikan wewenang oleh hukum negara tidak bisa berkerja secara maksimal, karena tidak memahami nilai lokal dan kebiasaan yang dianut oleh masyarakat. Sehingga terjadi penurunan kualitas pelayanan dalam hal distribusi air irigasi, yang kemudian memicu adanya konflik antara lembaga adat dan lembaga negara.

Solusi atas konflik lembaga adat dan lembaga negara dalam pengelolaan air irigasi adalah sinergisasi antara dua kelembagaan tersebut. Hal ini dilakukan dengan modernisasi hukum adat, yaitu mengakui eksistensi ulu-ulu sebagai instrumen adat yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Sedangkan pemerintah membuat lembaga HIPPA pada daerah-daerah yang tidak memiliki hukum adat. Dapat pula pemerintah mengadopsi pranata adat untuk menjadi petugas HIPPA dengan catatan tidak mengubah norma-norma yang telah ada sebelumnya.

ABSTRAC

Indonesia is agricultural country, where its public majority having profession as farmer. For the reason, Indonesian public look water as essential part of agrarian life pattern. In such a way the importance of the role of irrigation water for life of public finally arises local wisdom values arranging about water management of irrigation. Adherence of public to the social norms finally grows custom institute managing irrigation water.

At the development, custom institute increasingly losing of existence with existence of formal institutes formed by state. Basicly in normatif the formal institute formed by state in the effort taking care of water management stability of irrigation. But there is also political motif, that water management institute of irrigation in punishing state is a prerequisite to get loan from outside country. Thereby, existence of institute formed by the government do not be based requirement to of the farmers, but caused by importance of state to injection of foreign fund.

This thesis lifts three fundamental problems, that is : (a) How water management of irrigation done by custom legal institution and state law; (b) How arrangement of water management for irrigation by state law in East Java as effort to increase agribisnis?; (c) Is conflict happened in water management of irrigation and solution to the problems in legislation ?.

Water management of Irrigation done by custom legal institution is done by generationsly. With is guided by the local wisdom is hereditary values has been followed by some generations. Conflict happened in water management of irrigation arises as as result of existence of governmental instrument that is HIPPA as new organizer. Arrangement of water management of irrigation which is made government is more have the character of top down, so that doesn't see aspect sosiologis which has lived in public and not akomodatif to local wisdom norms beforehand is exist. As a result there is interaction between instrumen state law and customary law which ended at conflict pengelola irrigation water, the conflict in the form of lifting of way of distribution of water, compensation given to water management, and lifting of block head replacing function of ulu-ulu.

Arrangement of water management for irrigation by state law in East Java is done through East Java Province By Law No 6 The year 2003 About Irrigation, which then folowed up by law at each Kabupaten/Kota in East Java region. HIPPA is institution that is formally confessed by Local Government of East Java Province to do management at irrigation water area. Formal institution given authority by state law cannot work maximumly, because doesn't comprehend local value and habit embraced by public. So happened degradation of quality of service in the case of distribution of irrigation water, which then triggers existence of conflict between custom institutes and state institute.

Keyword : water, irrigation, customs, law.

DAFTAR ISI

Halaman sampul depan.....	i
Halaman sampul dalam.....	ii
Halaman prasyarat gelar.....	iii
Halaman persetujuan.....	iv
Halaman penetapan panitia penguji.....	v
Halaman pernyataan orisinalitas tesis.....	vi
Halaman ucapan terima kasih.....	vii
Halaman ringkasan.....	x
Halaman abstrak.....	xii
Halaman daftar isi.....	xiii
Halaman daftar lampiran.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Permasalahan.....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
1.5 Metodologi.....	13
1.5.1 Tipe Penelitian.....	14
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	14
1.5.3 Bahan Hukum dan Sumber Bahan Hukum.....	15
1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	15
1.5.5 Metode Analisis.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1 Sejarah Pengelolaan Air Irigasi di Indonesia.....	17
2.2 Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air.....	24
2.3 Fungsi HIPPA dalam Kaitannya dengan Pengelolaan Irigasi.....	28
2.4 Pengertian Agribisnis dalam Kaitannya dengan Irigasi.....	35
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL.....	40
BAB IV PEMBAHASAN.....	44

4.1 Pengelolaan Air Irigasi Oleh Lembaga Hukum Adat dan Hukum Negara	45
4.1.1 Pengelolaan Air Irigasi oleh Lembaga Adat.....	46
A. Lembaga Adat Subak di Bali.....	48
B. Lembaga Adat Ulu-Ulu Desa di Jawa.....	50
C. Lembaga Adat Raksabumi di Jawa Barat.....	51
D. Lembaga Adat Tuo Banda atau Datuak Ampek di Sumatera Barat	53
4.1.2 Pengelolaan Air Irigasi Oleh Hukum Negara.....	55
A. Pengaturan Pengelolaan Air Irigasi Sebelum Kemerdekaan.....	56
B. Pengaturan Pengelolaan Sumberdaya Air Setelah Kemerdekaan...	58
C. Pengelolaan Sumberdaya Air pada masa Reformasi.....	63
4.2 Pengaturan Pengelolaan Air Irigasi oleh Hukum Negara di Jawa Timur	67
Sebagai Upaya Meningkatkan Agribisnis.....	
4.2.1 Pengelolaan Air Irigasi Oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air	
(P3A).....	68
4.2.2 Pengelolaan Air Irigasi Oleh Himpunan Petani Pemakai Air	
(HIPPA).....	71
A. Pengaturan Pengelolaan Air Irigasi Oleh Pemerintah	
Provinsi Jawa Timur.....	71
B. Pengaturan Pengelolaan Air Irigasi Oleh Pemerintah	
Kabupaten Bangkalan.....	74
C. Pengaturan Pengelolaan Air Irigasi Oleh Pemerintah Daerah	
Kota Madiun.....	76
D. Pengaturan Pengelolaan Air Irigasi Oleh Pemerintah Daerah	
Kabupaten Sidoarjo.....	78
4.2.3 Pengelolaan Air Irigasi Sebagai Upaya Meningkatkan Kegiatan	
Agribisnis di Jawa Timur.....	83
4.3 Konflik Pengelolaan Air Irigasi dan Solusinya.....	86
4.3.1 Persoalan Pengelolaan Air Irigasi di Jawa Timur.....	86
4.3.2 Konflik Pengelolaan Air Irigasi Sebagai Akibat Adanya Interaksi	
Antara Hukum Adat dan Hukum Negara.....	90
4.3.3 Solusi Atas Konflik Pengelolaan Sebagai Akibat Adanya	
Interaksi Antara Hukum Adat dan Hukum Negara.....	112

BAB IV PENUTUP 116

4.1 Kesimpulan 116

4.2 Saran 117

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
2. Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2006 tentang Irigasi.